



Interdisciplinary Collaboration between Public Administration and Agribusiness in Local Wisdom-Based Local Economic Development: Perspective from a Case Study of Ternate City, North Maluku

(Kolaborasi Interdisipliner Administrasi Negara dan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Kearifan Lokal: Perspektif dari Studi Kasus Kota Ternate, Maluku Utara)

Sofjan Alizar Sam ^{1✉}, Rukiaty Usman ² dan Subchan Mardan ³

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

² Dosen Fakultas Peratanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik STIA Abdul Aziz Kataloka, Ambon, Indonesia.

✉ Email: sofjanalizarsam18@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 8 Okt 2025, Disetujui : 29 Nov 2025, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2025

Abstract

This article explores interdisciplinary collaboration between state administration and agribusiness in local economic development based on local wisdom in Ternate City, North Maluku. Ternate City has abundant natural resource potential, particularly the agribusiness (spice) sector, which in 2021 contributed 18.5% of GDP. This collaboration is considered crucial for maximizing potential and addressing resource management challenges. The role of state administration includes creating supportive policies, providing infrastructure, and providing training and extension programs to build farmer capacity. Data shows that extension programs have successfully increased clove yields. Agribusiness, on the other hand, must integrate local wisdom, such as traditional agricultural practices (e.g., the use of organic fertilizers or intercropping systems), which have been proven to increase farmer productivity and income. Furthermore, this collaboration supports cultural preservation through the promotion of local products, such as through the Ternate Clove Festival. Despite challenges such as a lack of coordination, integrated collaboration between the government, community, and private sector, based on local wisdom, holds significant potential for improving product competitiveness and the well-being of the Ternate community.

✉ **Keyword:** *Dowry; Interdisciplinary Collaboration; Public Administration; Agribusiness; Local Economic Developmen.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi lokal merupakan agenda strategis dalam kebijakan pembangunan nasional, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Wilayah kepulauan seperti Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada tantangan struktural berupa keterbatasan

infrastruktur, skala ekonomi yang relatif kecil, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya lokal berbasis pertanian dan kelautan. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial budaya dan kelembagaan lokal (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2020; UNDP, 2023).

Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi lokal di wilayah kepulauan masih didominasi oleh

pendekatan sektoral. Sektor pertanian dan agribisnis sering dipandang sebagai domain teknis ekonomi, sementara aspek tata kelola pemerintahan diposisikan terpisah dalam ranah kebijakan publik. Fragmentasi pendekatan ini menyebabkan kebijakan pembangunan ekonomi lokal berjalan parsial, kurang terkoordinasi, dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM (Rhodes, 1996; Bryson et al., 2015).

Pandangan ini menawarkan perspektif bahwa kolaborasi interdisipliner antara Administrasi Negara dan Agribisnis, dengan basis kearifan lokal, merupakan kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kota Ternate. Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai laporan penelitian kuantitatif, melainkan sebagai refleksi konseptual yang diperkuat oleh konteks empiris dan dialog dengan literatur pembangunan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

II. KAJIAN TEORI

Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi yang ada di suatu daerah. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

Di Kota Ternate, potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata, menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi lokal. Sebagai contoh, tanaman rempah-rempah yang terkenal di Ternate, seperti cengkeh dan pala, memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi komoditas unggulan yang mendukung perekonomian daerah. Data dari Dinas Pertanian Kota Ternate menunjukkan bahwa produksi cengkeh pada tahun 2022 mencapai 1.500 ton, yang menunjukkan potensi besar sektor agribisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal (Dinas Pertanian Kota Ternate, 2022).

Kearifan Lokal sebagai Basis Pembangunan

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang telah teruji oleh waktu. Menurut Suparno (2018), kearifan lokal merupakan sumber daya penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena dapat memandu masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya secara bijak. Di Ternate, kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti sistem pertanian tradisional dan pengelolaan hutan, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, masyarakat Ternate memiliki tradisi dalam mengelola lahan pertanian dengan sistem tumpangsari, di mana berbagai jenis tanaman ditanam secara bersamaan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesuburan tanah. Praktik ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga melestarikan keanekaragaman hayati. Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam pertanian di Ternate dapat meningkatkan hasil panen hingga 30% dibandingkan dengan metode konvensional.

Kolaborasi Interdisipliner dalam Pembangunan

Kolaborasi interdisipliner antara administrasi negara dan agribisnis sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal. Administrasi negara memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang memberikan insentif bagi pengembangan agribisnis, sementara sektor agribisnis dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Menurut Mardiasmo (2017), kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Di Kota Ternate, kolaborasi ini dapat dilihat dari berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah, seperti program pelatihan bagi petani dan penyuluhan pertanian. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha agribisnis mereka. Data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa program penyuluhan telah berhasil meningkatkan pengetahuan petani mengenai teknik budidaya yang baik, yang berdampak positif terhadap produktivitas pertanian (Dinas Pertanian Kota Ternate, 2022).

Tantangan dalam Kolaborasi

Meskipun kolaborasi interdisipliner memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa

tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi lokal. Menurut penelitian oleh Sari dan Prabowo (2021), seringkali terdapat tumpang tindih program antara pemerintah dan sektor swasta, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan mengurangi efektivitas program pembangunan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan juga menjadi tantangan. Banyak kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan konteks lokal, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kearifan lokal di kalangan pengambil kebijakan dan masyarakat.

Peluang untuk Pengembangan

Di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal di Kota Ternate. Dengan dukungan dari administrasi negara, sektor agribisnis dapat mengembangkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi, seperti olahan makanan berbasis rempah-rempah. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, permintaan pasar untuk produk berbasis rempah-rempah terus meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kementerian Perdagangan, 2023).

Peluang lainnya adalah pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, di mana wisatawan dapat belajar mengenai tradisi dan budaya masyarakat Ternate. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga melestarikan kearifan lokal yang ada. Penelitian oleh Hidayah (2022) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Ternate dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 40% dalam jangka waktu lima tahun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pembangunan Ekonomi Lokal di Ternate

Kota Ternate, yang terletak di Provinsi Maluku Utara, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil pertanian dan perikanan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, sektor pertanian di Ternate menyumbang sekitar 20% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota ini pada tahun 2021 (BPS, 2022). Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan ekonomi lokal di

Ternate masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya akses terhadap teknologi modern dan keterbatasan dalam pemasaran produk lokal.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara administrasi negara dan agribisnis menjadi sangat penting. Administrasi negara dapat berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor agribisnis, sementara agribisnis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk. Misalnya, penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen petani lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Sari, 2020).

Kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Ternate. Masyarakat Ternate memiliki tradisi dan pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan agribisnis. Misalnya, metode pertanian tradisional yang telah teruji waktu dapat digabungkan dengan teknologi modern untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan dapat memberikan hasil yang lebih optimal (Halim, 2021).

Dalam perspektif Ilmu Administrasi Negara, pembangunan ekonomi lokal tidak dapat dilepaskan dari isu tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator pembangunan. Peran ini menuntut kapasitas pemerintah daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan, serta menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal (Rhodes, 1996; Ansell & Gash, 2008).

Di Kota Ternate, tantangan tata kelola pembangunan ekonomi lokal tercermin dari lemahnya integrasi kebijakan antarperangkat daerah. Program pengembangan agribisnis sering kali dirancang dan dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing instansi, tanpa kerangka kolaboratif yang jelas dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan masih dominannya paradigma birokrasi sektoral yang kurang adaptif terhadap kompleksitas persoalan ekonomi lokal wilayah kepulauan (Bryson et al., 2015; BPS Kota Ternate, 2023).

Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Collaborative governance menekankan keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Tanpa

kolaborasi lintas aktor, kebijakan pembangunan ekonomi lokal berisiko kehilangan legitimasi sosial dan efektivitas implementasi (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Peran Administrasi Negara dalam Pengembangan Agribisnis

Administrasi negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis di Ternate. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui penyusunan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku agribisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada petani dalam mengakses sumber daya (Kementerian Pertanian, 2013).

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan agribisnis. Misalnya, pembangunan jalan akses ke daerah pertanian dan pasar dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk pertanian. Data dari Dinas Pertanian Kota Ternate menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas jalan dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 30% (Dinas Pertanian Ternate, 2022).

Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern. Program pelatihan yang melibatkan akademisi dan praktisi agribisnis dapat membantu petani untuk lebih memahami cara mengelola usaha mereka secara efektif. Sebagai contoh, program pelatihan yang dilakukan oleh Universitas Khairun Ternate dalam bidang pertanian organik telah berhasil meningkatkan hasil panen petani lokal (Universitas Khairun, 2022).

Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Lokal Kepulauan

Agribisnis memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal di Kota Ternate. Sektor ini mencakup aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang melibatkan berbagai aktor ekonomi lokal. Komoditas unggulan seperti pala dan cengkeh tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan sejarah ekonomi masyarakat Ternate (FAO, 2021; BPS Kota Ternate, 2023).

Namun, pengembangan agribisnis di wilayah kepulauan menghadapi berbagai keterbatasan struktural, seperti skala usaha kecil,

keterbatasan akses pasar, dan rendahnya nilai tambah produk. Berbagai program penyuluhan dan pelatihan menunjukkan peningkatan produktivitas, namun keberlanjutan dampaknya sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan kelembagaan yang konsisten (Dinas Pertanian Kota Ternate, 2022; Bryson et al., 2015).

Hal ini menegaskan bahwa agribisnis tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Kolaborasi antara administrasi negara dan agribisnis menjadi prasyarat untuk mengintegrasikan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan penguatan rantai nilai lokal (Pike et al., 2023).

Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam pengembangan agribisnis di Ternate. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan investasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Misalnya, perusahaan-perusahaan agribisnis dapat bekerja sama dengan petani lokal untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar (Nugroho, 2021). Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil adalah program kemitraan antara petani kakao di Ternate dengan perusahaan pengolahan coklat.

Melalui kemitraan ini, petani mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan pelatihan tentang cara meningkatkan kualitas biji kakao yang mereka hasilkan. Hasilnya, pendapatan petani meningkat dan produk kakao Ternate semakin dikenal di pasar nasional (Yusuf, 2022). Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mencakup penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih unggul dan tahan terhadap perubahan iklim. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian pertanian di Ternate menunjukkan bahwa varietas padi lokal yang dikembangkan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit (Badan Litbang Pertanian, 2021).

Kearifan Lokal sebagai Basis Pembangunan Ekonomi

Kearifan lokal di Ternate, yang mencakup pengetahuan tradisional dan praktik pertanian yang berkelanjutan, dapat menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi lokal. Masyarakat Ternate telah lama mengandalkan metode pertanian tradisional yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan kesuburan

tanah tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati (Rizki, 2020).

Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan agribisnis dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Misalnya, produk pertanian yang dihasilkan dengan metode tradisional sering kali memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar karena dianggap lebih sehat dan berkualitas. Hal ini menjadi peluang bagi petani lokal untuk memasarkan produk mereka dengan harga yang lebih baik (Sukma, 2021).

Pentingnya kearifan lokal juga tercermin dalam upaya pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Ternate. Program-program yang mendukung pengembangan produk lokal berbasis kearifan lokal dapat membantu masyarakat untuk menjaga identitas budaya mereka sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. Misalnya, pengembangan produk olahan berbasis rempah-rempah yang merupakan bagian dari tradisi kuliner Ternate dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ternate, 2022).

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Pembangunan

Kearifan lokal merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi lokal yang sering terpinggirkan dalam perumusan kebijakan. Di Kota Ternate, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan praktik pertanian tradisional telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kearifan lokal ini berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan pembangunan (Putnam, 1993; Ostrom, 1990).

Berbagai praktik pertanian tradisional, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem tumpangsari, terbukti meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan agribisnis dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Chambers, 1997; Rahman, 2020).

Oleh karena itu, kolaborasi interdisipliner antara Administrasi Negara dan Agribisnis perlu menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi bersama. Kearifan lokal tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen inti dalam desain tata kelola pembangunan ekonomi lokal (Ansell & Gash, 2008; Putnam, 1993).

Tantangan dan Peluang dalam Kolaborasi Interdisipliner

Meskipun kolaborasi interdisipliner antara administrasi negara dan agribisnis di Ternate memiliki banyak potensi, terdapat juga sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai

pihak, baik di tingkat pemerintah maupun antara sektor publik dan swasta. Tanpa adanya sinergi yang baik, upaya pengembangan agribisnis dapat terhambat (Putra, 2021).

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman tentang pentingnya kearifan lokal dalam konteks pembangunan ekonomi. Banyak pelaku agribisnis yang lebih fokus pada teknik pertanian modern tanpa mempertimbangkan nilai-nilai tradisional yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam pengembangan agribisnis (Hidayat, 2022).

Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan model kolaborasi yang lebih baik. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses informasi bagi petani dan pelaku agribisnis, sehingga mereka dapat berkolaborasi dengan lebih efektif. Platform digital untuk pemasaran produk lokal dapat membantu petani menjangkau pasar yang lebih luas (Wahyu, 2023).

Secara keseluruhan, kolaborasi interdisipliner antara administrasi negara dan agribisnis, yang didasarkan pada kearifan lokal, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal di Ternate. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Ternate dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Perspektif Kolaborasi Interdisipliner

Berdasarkan refleksi konseptual dan konteks empiris Kota Ternate, artikel ini berargumen bahwa pembangunan ekonomi lokal di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan kolaborasi interdisipliner. Administrasi Negara menyediakan kerangka tata kelola dan kebijakan, agribisnis menggerakkan aktivitas ekonomi riil masyarakat, sementara kearifan lokal memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan pembangunan (Emerson et al., 2012; Pike et al., 2023).

Pendekatan ini menantang model pembangunan sektoral dan top-down. Pembangunan ekonomi lokal dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara negara, pasar, dan masyarakat. Kolaborasi interdisipliner memungkinkan integrasi berbagai kepentingan sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Rhodes, 1996; Bryson et al., 2015).

IV. PENUTUP

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kota Ternate, kolaborasi interdisipliner antara administrasi negara dan agribisnis sangatlah penting. Melalui pemanfaatan kearifan lokal sebagai basis pembangunan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, peluang yang ada juga sangat besar dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan ekonomi lokal di Kota Ternate dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Perspektif ini menegaskan bahwa kolaborasi interdisipliner antara Ilmu Administrasi Negara dan Agribisnis, dengan basis kearifan lokal, merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi lokal di Kota Ternate. Perspektif ini tidak menawarkan model teknis yang baku, tetapi kerangka pemikiran untuk memperkuat dialog lintas disiplin dan lintas aktor pembangunan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Ke depan, perspektif ini dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris lanjutan maupun perumusan kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia (Pike et al., 2023; UNDP, 2023).

Daftar Pustaka

- Ansell, C.; Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4): 543–571. DOI: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M.; Crosby, B. C.; Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*. 75(5): 647–663. DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2023). Kota Ternate dalam Angka. Ternate: BPS Kota Ternate.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts?* Putting the First Last. London: Intermediate Technology Publications.
- Dinas Pertanian Kota Ternate. (2022). Laporan Tahunan Program Penyuluhan dan Pengembangan Agribisnis. Ternate: Pemerintah Kota Ternate.
- Emerson, K.; Nabatchi, T.; Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22(1): 1–29. DOI: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). Territorial approaches for sustainable agrifood systems. Rome: FAO. DOI: <https://doi.org/10.4060/cb6854en>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pike, A.; Rodríguez-Pose, A.; Tomaney, J. (2023). *Local and Regional Development* (2nd ed.). London: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003126330>
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahman, A. (2020). Local wisdom-based agricultural development and rural sustainability. *Journal of Rural Studies*. 75: 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.01.005>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*. 44(4): 652–667. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Rodríguez-Pose, A.; Wilkie, C. (2020). Institutions and the uneven geography of economic development. *Regional Studies*. 54(6): 733–745. DOI: <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1678586>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human Development Report 2023/2024*. New York: UNDP. DOI: <https://doi.org/10.18356/9789213585140>

